

# KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II TOMOHON

Jl. PL. Kaunang Kel. Kolongan Kec. Tomohon Tengah Kota Tomohon 95441 Telepon : (0431)3159576 Faksimile : (0431)3159589 Laman : <u>www.lpkatomohon.kemenkumham.go.id</u>, Surel : lpka.tomohon@kemenkumham.go.id

# LAPORAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II TOMOHON

# A. PENDAHULIAN

Dalam rangka pembangunan menuju WBK/WBBM, LPKA TOMOHON dengan ini menyusun rencana aksi atas Perjanjian Kinerja menuju WBK/WBBM untuk merencanakan hal apa saja kedepannya yang dapat mendukung Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. Rencana Aksi yang dimaksud merupakan rencana untuk menghadapi hal-hal yang akan terjadi dimasa mendatang dan merubah hal yang sebelumnya dianggap kurang. Menindaklanjuti hal tersebut, seluruh tim pokja dengan ini membuat rencana aksi atas Perjanjian Kinerja ditiap-tiap bagian dalam menunjang pembangunan ZI menuju WBK/WBBM untuk menentukan hal apa saja yang akan dirubah dan diperbaiki agar LPKA TOMOHON dapat menyandang gelar WBK/WBBM.

### B. DASAR

1. Permenpan RB No 52. Tahun 2014 Tentang pedoman pembangunan ZI Pedoman Pembangunan ZI Kemenkumham

#### C. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Dibuatnya perjanjian kerja bertujuan untuk menjadi panduan tahapan yang ingin dicapai dalam pembangunanZonaIntegritasmenujuWBK/WBBM
- 2. Sebagai langkah monitoring dan evaluasi Tim Kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
- 3. Sebagai wujud komitmen dari Tim Kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di LPKA TOMOHON

# D. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan penyusunan rencana kerja ini dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Februari 2024 Waktu : 10.00 WITA s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat LPKA Tomohon

Peserta: Tim ZI LPKA Tomohon

#### E. HASIL

Bahwa sudah terlaksananya penyusunan rencana aksi atas Perjanjian Kinerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di LPKA Tomohon. Dengan mempertimbangkan rencanakerja sebagai acuan langkah untuk menentukan rencana aksi dan target prioritas di LPKA Tomohon.

Tomohon, 27 Februari 2024

KEPALA

HERI SULISTYO, BC.IP., S.H., M.H NIP. 197009181992031001

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II TOMOHON DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	,		85%
	Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%
		yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.	90%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	90%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	29%
		Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan danbersertifikat	85%
		Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
2.	Hak Pendidikan Anak di	ersentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	100%
	LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	100%
	Standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%
3.	di wilayah sesuai standar	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	90%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90%
4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasyarakatan dan Kapasitas Hunian	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Dokumen
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Dokumen

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Layanan Manajemen Satker	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Dokumen
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Dokumen
5.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Jumlah Kendaraan Bermotor	Unit
		Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit
		4. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Unit
		5. Jumlah Gedung/Bangunan	UPT